

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Ketimpangan

Kesenjangan atau ketimpangan distribusi pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baldwin, 1986). Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (Jhingan, 1999). Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2012).

Menurut Kuncoro (2006) menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

Simon Kuznet (1955) menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya pemerataan pendapatan. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva kuznet “U-terbalik”, karena perubahan *longitudinal (time-series)* dalam distribusi pendapatan.

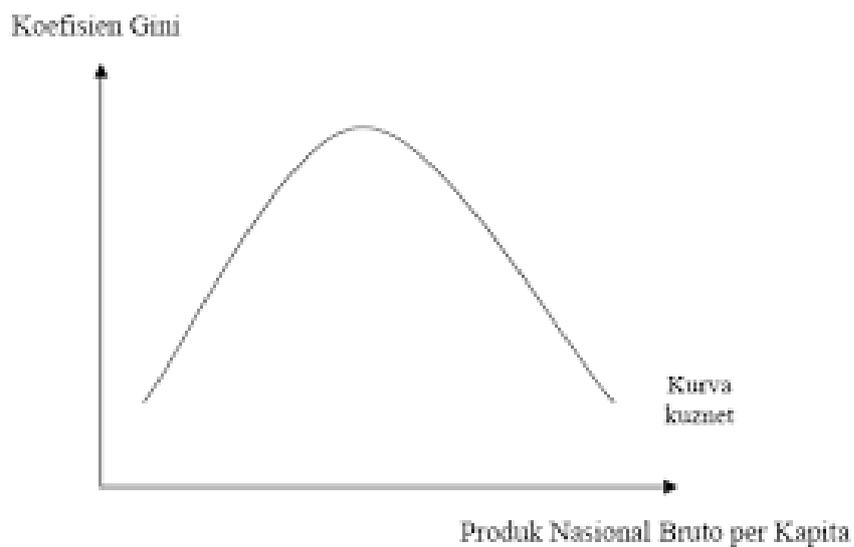
2. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut Sukirno (2006), pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapatan, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak (Sukirno, 2006). Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 2006).

Menurut Sukirno (2013), distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek dalam masalah kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan ukuran kemiskinan relatif. Terdapat dua kategori tingkat kemiskinan yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi dimana tingkat pendapatan yang diterima seseorang tidak cukup

untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan daerah (Sukirno, 2006).

Teori ketimpangan distribusi pendapatan dapat dikatakan dimulai dari munculnya suatu hipotesis yaitu hipotesis “U-terbalik” yang dikemukakan oleh Simon Kuznet tahun 1955. Kuznet (1955) menyatakan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan akan makin merata.



Sumber: Todaro (2006)

Gambar 2.1 Kurva Kuznet

Pada gambar 2.1 dapat diketahui bahwa pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi makin merata. Beberapa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan oleh Kuznet tidak dapat dihindari,

namun semua tergantung pada proses pembangunan yang dijalankan oleh masing-masing negara (Todaro, 2006).

Terdapat dua model ketimpangan yaitu teori menurut Harrod Domar dan teori menurut Neo-klasik. Kedua teori tersebut memberikan peranan khusus pada peranan modal yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik modal kedalam daerahnya. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kemampuan setiap daerah untuk tumbuh sekaligus akan menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi dianggap lebih menguntungkan jika dialokasikan pada daerah yang mampu menghasilkan pengembalian (*return*) yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat pertumbuhannya justru relatif lambat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang di seluruh wilayah dalam negara (Sjafrizal, 2012)

Menurut Myrdal (1997), terjadinya ketimpangan regional disebabkan oleh besarnya pengaruh dari *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang. Perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan regional, permintaan yang meningkat ke wilayah maju akan merangsang investasi dan akan meningkatkan pendapatan.

3. Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

a) Size Distribution

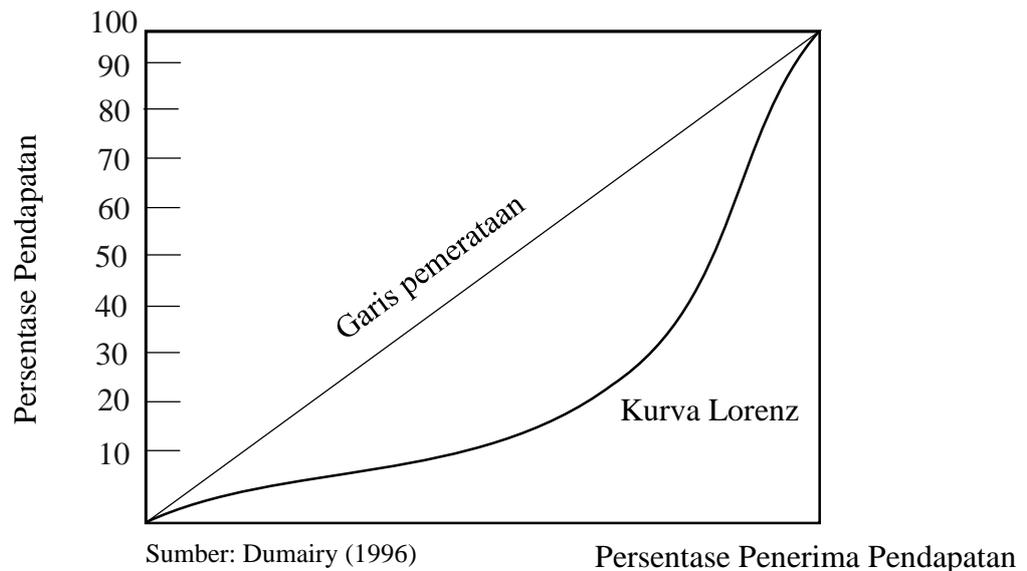
Secara umum ketimpangan yang pertama ini dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang paling miskin. Selanjutnya ukuran ketimpangan bisa pula dilakukan dengan membandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang paling kaya (Hudiyanto, 2015).

- 1) Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
- 2) Tingkat ketimpangan sedang apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional.
- 3) Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional.

b) Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya merepresentasikan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya merepresentasikan persentase kumulatif penduduk. Kurvanya ditempatkan pada diagonal bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menandakan bahwa distribusi pendapatan nasional yang semakin merata, sebaliknya jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka menunjukkan keadaan

yang semakin buruk, dan distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata (Arsyad, 1997)



Gambar 2.2 Kurva Lorenz

c) Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antar diagonal, kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga di bawah diagonal. Indeks Gini bernilai antara nol hingga satu. Jika nilai indeks gini mendekati nol maka menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah sedangkan jika nilai indeks gini mendekati satu maka menunjukkan adanya ketimpangan yang tinggi (Todaro, 2006). Indeks gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran data yang diperlukan dalam penghitungan indeks gini meliputi: 1) jumlah rumah tangga atau penduduk; 2)

rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks gini adalah:

$$G = \sum_{i=1}^k \frac{P_i(Q_i + Q_{i-1})}{1000}$$

Keterangan:

G = Indeks Gini

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas -i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke -i

k = Banyaknya kelas pendapatan

nilai indeks gini berkisar antara 0 dan 1, jika:

$G < 0,3$ = ketimpangan rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang

$G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

d) Menurut Bank Dunia

Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk.

Tabel 2.1 Indikator Ketimpangan Menurut Bank Dunia (World Bank)

| Klasifikasi Ketimpangan | Ketimpangan Distribusi Pendapatan |
|-------------------------|--|
| Ketimpangan Tinggi | 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima < 12% dari total pendapatan |

| | |
|--------------------|---|
| Ketimpangan Sedang | 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima 12% -17% dari total pendapatan |
| Ketimpangan Rendah | 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima > 17% dari total pendapatan |

Sumber: World Bank

4. Penyebab Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Adelman dan Morris (1973) mengemukakan delapan faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yakni

- 1) Tingginya pertambahan penduduk yang akan berdampak pada penurunan pendapatan per kapita
- 2) Inflasi yaitu pertambahan pendapatan uang tetapi tidak dengan pertambahan produksi barang-barang
- 3) Ketimpangan pembangunan antar daerah
- 4) Banyaknya investasi dalam proyek padat modal (*capital intensive*). Sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, maka pengangguran bertambah.
- 5) Mobilitas sosial masyarakat yang rendah
- 6) Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga-harga barang hasil industri mengalami kenaikan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis

- 7) Ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang yang menyebabkan memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara yang sedang berembang dalam perdagangan dengan negara maju
- 8) Industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain akan hancur.

5. Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi

Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menganalisis keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Jhingan, 2000). Pertumbuhan ekonomi juga merupakan kemampuan suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan jenis barang-barang ekonomi yang semakin banyak penduduknya. Kemampuan ini dapat tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologis yang diperlukan (Kuznet, 1955)

Menurut Todaro (2006), pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah peningkatan hasil atau output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi dan digunakan dalam proses produksi masyarakat. Terdapat tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara, diantaranya sebagai berikut:

1. Akumulasi modal, meliputi modal manusia atau sumber daya manusia dan semua bentuk atau jenis investasi
2. Pertumbuhan penduduk, yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak angkatan kerja
3. Kemajuan teknologi, yang akan mendukung proses pembangunan ekonomi

Menurut Sukirno (2006), terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi yang muncul dalam analisis yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, dimana ciri-cirinya tersebut seringkali terikat satu sama lain. Ke enam ciri tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan pendapatan per kapita yang tinggi
2. Peningkatan produktifitas yang ditandai dengan meningkatnya laju produk per kapita
3. Laju perubahan struktural yang tinggi dimana hal ini mencakup kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa dan peralihan usaha-usaha perorangan menjadi perusahaan yang berbadan hukum serta perubahan status kerja buruh
4. Tingkat urbanisasi meningkat
5. Ekspansi dari negara lain
6. Peningkatan arus barang, modal, dan orang antar negara

Berikut ini teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang antara lain :

1. Teori David Ricardo dan T.R Malthus

David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan terus mengalami peningkatan hingga dua kali lipat pada suatu saat sehingga menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. David Ricardo ini memiliki satu pemikiran dengan Thomas Robert Malthus, dalam teorinya ia menyatakan bahwa hasil produksi akan bertambah menurut deret hitung (satu, dua, dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat, delapan, enam belas dan seterusnya). Pada akhirnya perpacuan antara pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk akan dimenangkan oleh pertumbuhan penduduk. Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah, hingga akhirnya menjadi faktor yang membatasi proses pertumbuhan suatu masyarakat (Arsyad, 1999).

Malthus juga mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa berlangsung secara terus menerus karena adanya batasan lingkungan. Jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sumber daya alam juga akan mengalami peningkatan eksploitasi dan limbah atau polusi yang kembali ke bumi atau lingkungan atau semakin meningkat juga. Eksploitasi sumber daya alam yang tersedia akhirnya menghancurkan sistem ekonomi (Sukirno, 2006).

2. Teori Arthur Lewis

Arthur Lewis mengasumsikan beberapa hal:

- a) Suatu perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu modern dan tradisional
- b) Faktor utama dalam produksi yaitu modal dan tenaga kerja
- c) Pada sektor pertanian terdapat surplus tenaga kerja
- d) Terjadi akumulasi kapital
- e) Sektor modern memiliki tingkat upah yang lebih tinggi
- f) Sektor tradisional pada umumnya memiliki tingkat upah yang konstan
(Hudiyanto, 2015)

3. Teori Harrod Domar

Teori ini melengkapi analisis Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Teori Keynes pada dasarnya menentukan dan menerangkan bahwa pengeluaran agregat akan meningkatkan kegiatan perekonomian. Keynes mencoba mengembangkan bagaimana konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan akan menentukan tingkat pendapatan nasional. Harrod Domar berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tingkat tabungan dan investasi. (Todaro, 1998).

4. Teori Rostow

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya terjadi pada perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja (Arsyad, 1999)

Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh setiap negara menurut Rostow:

- 1) Tahap masyarakat tradisional, yaitu dimana dalam produksi barang masyarakat masih menggunakan cara primitif
- 2) Tahap prasyarat lepas landas, yaitu tahap memasuki pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus tumbuh
- 3) Tahap lepas landas, yaitu tahap yang telah berhasil menyingkirkan hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi
- 4) Tahap dorongan kearah kedewasaan, yaitu muncul diversifikasi produk pada industri jasa
- 5) Tahap konsumsi massal yang tinggi, yaitu tahap dimana sektor industri mendominasi perekonomian (Hudiyanto,2015)

5. Teori Joseph Schumpeter

J. Schumpeter berpendapat bahwa tanpa adanya inovasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi di bidang teknologi produksi yang dilakukan oleh pengusaha. Inovasi yang dimaksud dapat berupa: penemuan produk baru, penemuan sumber bahan baku, penemuan teknik produksi baru, penemuan pasar baru, dan penemuan manajemen baru yang lebih efisien (Hudiyanto, 2015).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan berkurangnya ketimpangan distribusi pendapatan merupakan representasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, dan pada dasarnya

pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan tetap berpengaruh terhadap ketimpangan daerah. Ketimpangan daerah dalam hal ini merupakan ketimpangan perkembangan ekonomi antar berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah (Kuncoro, 2004).

Menurut Sjafrizal (2012), ketimpangan distribusi pendapatan pada negara sedang berkembang relatif lebih tinggi karena pada waktu proses pembangunan baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada lebih banyak dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik, sedangkan daerah yang masih terbelakang tidak mampu memanfaatkan peluang ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

b. Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Menurut Mankiw dan Wilson (2014) mengukur jumlah pengangguran adalah tugas badan pusat statistik negara yang menghimpun data pengangguran dan aspek-aspek pasar tenaga kerja lain, seperti jenis pekerjaan, jam kerja rata-rata dan durasi pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) negara biasanya mengelompokkan orang dewasa pada setiap rumah tangga yang disurvei ke dalam salah satu kategori berikut, yakni: bekerja, pengangguran dan tidak termasuk angkatan kerja. Menurut Sukirno (1994) dalam buku Pujualwanto (2014), pengangguran dapat dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan penyebab pengangguran dan berdasarkan cirinya.

Pengangguran berdasarkan penyebabnya (Sukirno, 1994) :

1) Pengangguran Normal

Pengangguran Normal atau pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi sebanyak dua atau tiga persen. Para penganggur ini tidak bekerja bukan karena tidak memperoleh pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan lain yang lebih baik.

2) Pengangguran Siklikal

Pengangguran Siklikal adalah pengangguran yang terjadi karena tidak stabilnya perekonomian. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi dan hal ini mendorong pengusaha untuk menaikkan produksi. Sehingga banyak pekerja yang dipergunakan dalam proses produksi. Akan tetapi adakalanya permintaan agregat menurun, dengan adanya kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan banyak perusahaan mengurangi pekerjanya sehingga pengangguran akan bertambah.

3) Pengangguran Struktural

Pengangguran Struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur kegiatan ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: terwujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi, biaya pengeluaran yang sangat tinggi, dan ekspor barang produksi yang menurun dikarenakan adanya persaingan antar negara-negara lain.

4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran Teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Seperti halnya ditentukannya inovasi pada sektor pertanian dan sektor industri.

Pengangguran berdasarkan cirinya (Sukirno, 1994) :

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran Terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan dalam perekonomian akan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu sehingga dikatakan pengangguran terbuka.

2) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran Tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi di sektor pertanian atau jasa. Setiap keadaan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja tergantung pada banyak faktor. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai.

3) Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang disebabkan oleh musim hujan atau kemarau. Pengangguran ini banyak terdapat pada sektor pertanian dan sektor perikanan.

4) Setengah Menganggur

Setengah Menganggur adalah pengangguran yang terjadi pada kondisi migrasi dari desa ke kota di negara-negara yang sangat pesat. Sehingga menyebabkan akan terjadi persaingan yang terjadi dalam mencari pekerjaan dan tidak akan mudah untuk memperoleh pekerjaan. Sebagian terpaksa menganggur menjadi penganggur separuh waktu. Disamping itu ada juga yang bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka jauh lebih rendah dari dari jam kerja normal.

Menurut Sjafrizal (2014) tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakatnya masih rendah, demikian pula sebaliknya. Indikator ini sangat penting bagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Ditinjau dari sudut individual, pengangguran menimbulkan masalah ekonomi dan sosial kepada siapa yang mengalami. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur mengurangi pengeluaran konsumsinya. Selain itu pengangguran juga dapat mempengaruhi taraf kesehatan keluarga (Sukirno, 2006).

Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka di suatu daerah sangat menentukan pendapatan yang terdistribusi di masyarakat. Jumlah pengangguran di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia. Terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia akan menyebabkan para tenaga kerja akan kesulitan mencari pekerjaan dan berpotensi untuk menganggur. Pada akhirnya Tingkat Pengangguran Terbuka di daerah tersebut akan meningkat. Dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut maka akan menyebabkan semakin tidak merata atau ketimpangan pendapatan yang beredar di masyarakat semakin tinggi.

c. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan

Distribusi Pendapatan

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi mempengaruhi perkembangan melalui tingkat pendapatan dan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sedangkan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik akan sangat menentukan untuk dapat mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010).

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, United Nation Development Program (UNDP, 1990), melakukan penelitian dan mencetuskan laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengenai pengkajian secara ekstensif tentang pembangunan manusia di seluruh dunia dan melaporkan secara berkala dalam laporan tahunan. Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indikator yang mengukur tingkat

kesejahteraan masyarakat tidak hanya secara ekonomi namun dari umur yang panjang, pendidikan, dan standar hidup (Wijayanto, 2015).

Todaro dan Smith (2004), Indeks Pembangunan Manusia terdapat pemeringkatan terhadap semua negara atau daerah dari skala nol (terendah) hingga satu (tertinggi) berdasarkan tiga produk akhir IPM:

- a) Usia harapan hidup merepresentasikan masa hidup seseorang
- b) Pengeluaran yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dengan rata-rata sekolah (satu pertiga)
- c) Pendapatan riil per kapita dapat mengukur Standar kehidupan, disesuaikan dengan disparitas daya beli dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas yang semakin menurun dari pendapatan.

Ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada suatu daerah atau wilayah tertentu akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia dan ketimpangan distribusi pendapatan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Becker (Tirmidzi, 2012) menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori *Human Capital*, bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan

mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang dengan adanya pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

d. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu jumlah PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor produksi yang ada pada daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut yang menyebabkan jumlah PDRB yang dihasilkan berbeda-beda antar daerah. Sedangkan jumlah PDRB per kapita dapat dihitung dari PDRB harga konstan yang dihasilkan pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah tertentu (Sasana, 2006).

PDRB per kapita dapat merupakan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Kuznet (dalam Arsyad, 2010) menjelaskan bahwa pembangunan di suatu negara pada batas-batas tertentu dapat memicu terjadinya ketimpangan ekonomi diantara warganya. Dalam analisisnya Kuznet menemukan relasi antara tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan tingkat pendapatan per kapita yang

berbentuk U terbalik, yaitu menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan, distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya, distribusi pendapatan akan membaik seiring meningkatnya pendapatan per kapita. menurut Wie (dalam Litantia, 2010) menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian di suatu negara yang pesat dapat memicu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi pula apabila permasalahan kemiskinan dan pengangguran di negara tersebut belum tertangani dengan baik.

e. Hubungan PMA dan PMDN Terhadap Ketimpangan Distribusi

Pendapatan

Menurut Mankiw (2006) Investasi merupakan komponen dari Produk Domestic Bruto (PDB) yang menunjukkan adanya keterkaitan masa kini dengan masa depan. Terdapat tiga jenis pengeluaran investasi, yaitu: a) Investasi bisnis tetap (*Business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi, b) investasi residensial (*residential investment*) mencakup rumah baru yang dibeli untuk tempat tinggal dan yang dibeli tuan rumah untuk disewakan, c) investasi persediaan (*inventory investment*) mencakup bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi. Barang-barang tersebut akan disimpan di gudang oleh perusahaan.

Menurut Sukirno (2006), investasi merupakan pengeluaran modal dari perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi dengan menambah kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi asing dibagi menjadi tiga, yaitu: Portofolio, *Foreign Direct Investment* (FDI) dan kredit ekspor

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh swasta dan ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan dan didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah, maka konsumsi juga akan bertambah (Laily dan Prityadi, 2013). Menurut Alfaro dkk (2000), investasi asing langsung (FDI) memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang juga merupakan komponen makro ekonomi. Dengan adanya peningkatan FDI pada negara yang sedang berkembang akan mendorong terwujudnya *labor intensive* yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kapasitas output yang dihasilkan, sehingga membuktikan bahwa FDI memiliki kontribusi yang penting terhadap perekonomian.

Investasi merupakan langkah awal kegiatan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan lesunya pertumbuhan ekonomi. Dengan tujuan untuk menumbuhkan perekonomian setiap negara akan berusaha menciptakan iklim yang dapat meningkatkan investasi. Sasaran dari upaya tiap negara tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri namun juga masyarakat atau swasta dari luar negeri (Dumairy, 1996)

Penanaman modal dalam negeri adalah sejumlah dana dari pemerintah pusat atau daerah yang berguna untuk membiayai kebutuhan publik dalam proses pembangunan (Pujoalwanto, 2014). Tujuan utama dari adanya penanaman modal dalam negeri adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,

sebagai modal untuk membuat jaringan-jaringan jalan raya, irigasi, rumah sakit dan sarana insfrastruktur lainnya (Laily dan Prityadi, 2013).

Dengan adanya penanaman modal asing dan dalam negeri diharapkan akan menjadi poin utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya negara berkembang. Dengan investasi baik dari asing maupun dalam negeri, negara berkembang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di setiap daerah. Maka dengan adanya investasi asing dan investasi dalam negeri akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

Yang menjadi perhatian penting adalah ketika investasi terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah saja. Hal ini didasari oleh para investor yang lebih memilih untuk menanamkan modalnya pada daerah yang memiliki insfrastruktur yang baik. Hal ini membuat daerah yang banyak menerima investasi dengan daerah yang kurang menerima investasi akan memiliki perbedaan dalam pendapatan yang diperoleh masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel di bawah menampilkan penelitian terdahulu yang relevan :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis, tahun, dan judul | Variabel | Metode Analisis | Hasil Penelitian |
|-----|---|---|--|---|
| 1 | Vredrich Bantika (2015), faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Utara | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Penduduk • Luas Lahan Pertanian • Pertumbuhan ekonomi | Analisis regresi regresi linier berganda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan 2. Variabel luas lahan pertanian tidak berpengaruh signifikan 3. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan |
| 2 | Yosi Eka Putri dkk (2015), analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Derajat otonomi fiskal daerah • Rasio pajak • Produktivitas tenaga kerja • Investasi • IPM • Pertumbuhan ekonomi | Analisis regresi data panel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel derajat otonomi fiskal daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Variabel Rasio Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 3. Variabel Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 4. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan 5. Variabel produktivitas tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan 6. Variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan 7. Variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan |

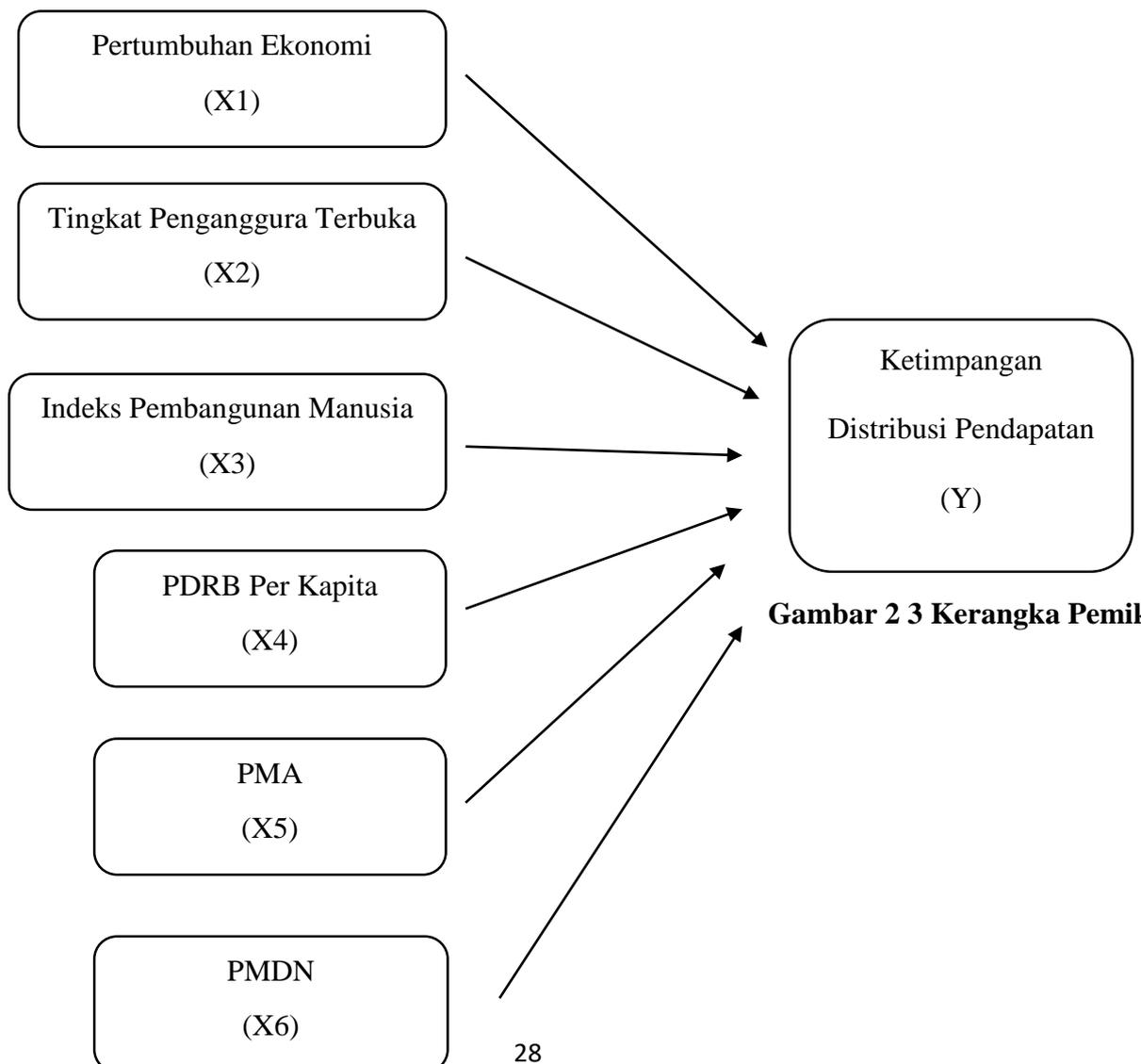
| | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|--|
| | | | | distribusi pendapatan |
| 3 | Ni Luh Putu Yuni Adi Puryanti dan I ketut Sudibia (2015), analisis pengaruh jumlah penduduk yang bekerja dan investasi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi Kab/Kota di Provinsi Bali | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk yang bekerja • Investasi • Pertumbuhan ekonomi | Analisis jalur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel jumlah penduduk yang bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 3. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 4. Variabel jumlah penduduk yang bekerja dan variabel investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. |
| 4 | Yeni Del Rosa dan Ingra Sovita (2016), analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatn di Pulau Jawa | <ul style="list-style-type: none"> • PDRB per kapita • Penduduk • Tingkat Pengangguran Terbuka • Derajat desentralisasi fiskal | Analisis regresi data panel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan 2. Variabel penduduk berpengaruh positif dan signifikan 3. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan 4. Variabel derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan |
| 5 | Diah Pradnyadewi dan Ida Bagus Putu (2016), pengaruh IPM, biaya infrastruktur, investasi dan pertumbuhan ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> • IPM • Biaya infrastruktur • Investasi • Pertumbuhan ekonomi | Analisis jalur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Variabel biaya infrastruktur tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 3. Variabel investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|--|
| | terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali | | | <p>pertumbuhan ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Variabel IPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 5. Variabel biaya infrastruktur tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 6. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan |
| 6 | Sultan dan Jamzani Sodik (2010), analisis ketimpangan pendapatan regional di DIY-Jawa Tengah serta faktor-faktor yang mempengaruhi | <ul style="list-style-type: none"> • Penanaman modal asing • Pertumbuhan ekspor • PDRB per kapita | Analisis kesenjangan Entropy Theil | <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel penanaman modal asing berpengaruh negatif dan signifikan 2. Variabel pertumbuhan ekspor berpengaruh negatif dan signifikan 3. Variabel PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan |
| 7 | Nita Tri Hartini (2016), analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan | <ul style="list-style-type: none"> • PDRB per kapita • Investasi • IPM | Analisis regresi data panel | <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan 2. Variabel investasi berpengaruh negatif dan signifikan 3. Variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan |

| | | | | |
|----|---|--|----------------------------------|---|
| 8 | Nobuo Akai dan Masayo Sakata (2005), Fiscal decentralitation contributes to economic growth: evidence from state-level cross section data for the United States | <ul style="list-style-type: none"> • Desentralisasi fiskal • PDRB per kapita • Aglomerasi penduduk • Industri • Politik • FDI • Tingkat pengangguran terbuka • Populasi penduduk | Analisis regresi linier berganda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif dan signifikan 2. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan 3. Variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan 4. Variabel populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan 5. Variabel politik dan FDI berpengaruh positif dan signifikan |
| 9 | Jonna P Estudillo (1997), Income inequality in the Philippines 1961-91 | <ul style="list-style-type: none"> • Populasi penduduk • Jumlah penduduk berusia tua • Pendapatan rumah tangga | Analisis regresi linier berganda | <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan 2. Variabel jumlah penduduk berusia tua berpengaruh negatif dan signifikan 3. Pendapatan rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan |
| 10 | Shantong Li dkk (2016), the trend of regional income disparity in China | <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran pemerintah • Tingkat infrastruktur • Urbanisasi • pendidikan | Analisis regresi linier berganda | Menurut hasil regresi, pengeluaran pemerintah, tingkat infrastruktur, urbanisasi, dan pendidikan memiliki dampak signifikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan ketimpangan pendapatan regional. |

C. Kerangka Pemikiran

Pada pembahasan ini, atas dasar pemikiran teoritis dan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai berbagai hubungan antara variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, PDRB per kapita, PMDN, dan PMA) dengan variabel dependen (Ketimpangan Distribusi Pendapatan/Indeks Gini), maka faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan (Indeks Gini) di setiap provinsi di Indonesia dapat di gambarkan dengan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2 3 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan, maka akan disajikan beberapa hipotesis penelitian yakni sebagai berikut :

1. Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia
2. Diduga bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia
3. Diduga bahwa Indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia
4. Diduga bahwa Produk Domestik Regional Bruto per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia
5. Diduga bahwa Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia
6. Diduga bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia